

BAB III

ANALISIS REPRESENTASI PEMILIHAN UMUM 2024 DALAM FILM DOKUMENTER *DIRTY VOTE* (2024)

Dalam bab ini, pendekatan semiotika John Fiske digunakan untuk menganalisis film dokumenter *Dirty Vote*. Pendekatan ini terdiri dari tiga tingkat pengkodean yaitu level realitas, representasi, dan ideologi. Pada level realitas, analisis akan berfokus pada penampilan, ekspresi wajah, gerakan, pola bicara, dan setting yang terkait dengan narasi kecurangan dalam Pemilu, serta bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi pada penggambaran isu tersebut. Level representasi akan menelaah aspek teknis seperti sudut kamera, pencahayaan, dan teknik penyutitan yang mempengaruhi persepsi audiens terhadap kuasa dan perjuangan yang digambarkan dalam film. Terakhir, level ideologis akan membahas pesan budaya yang lebih luas yang disampaikan oleh film dokumenter ini, khususnya terkait skenario kecurangan Pemilu yang digambarkan oleh film, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang integritas dan keadilan dalam proses Pemilu. Analisis ini difokuskan pada 22 adegan yang dipilih untuk mengungkap bagaimana film menggambarkan Pemilu 2024, dengan memperhatikan elemen visual dan naratif yang membentuk persepsi audiens tentang kecurangan dalam Pemilu. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami makna yang tersembunyi dalam film dan bagaimana film tersebut membentuk pandangan tentang integritas dan keadilan dalam proses Pemilu.

3.1 Dominasi Politik Presiden Jokowi

Film dokumenter *Dirty Vote 2024* menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mendominasi pemilihan umum 2024, baik secara langsung maupun melalui jaringan kekuasaan yang dia bangun selama dua periode kepemimpinannya. Dalam presentasi ini, diceritakan bahwa Presiden Jokowi berperan utama dalam menggunakan strategi kemenangan, memilih PJ daerah, dan membuat gesture politik yang berpihak pada pasangan calon tertentu, terutama paslon 02.

Film ini berfokus pada dominasi politik Presiden Jokowi sebagai aktor utama dalam pemilu 2024. Untuk memperkuat persepsi bahwa Jokowi memainkan peran sangat besar dalam dinamika dan arah Pemilu 2024, tema ini dibangun dari berbagai scene yang disusun secara sinematik, visual, dan naratif.

Adegan pertama yang mana ketiga pakar hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti memberikan pesan dengan ekspresi serius mengemukakan pandangannya mengenai Pemilu 2024.



Scene 1 Time Code (0:08-1:19).

Scene ini memberikan narasi tentang hukuman moral terhadap Presiden Jokowi. Zainal Arifin Mochtar secara eksplisit menyatakan bahwa nama

Presiden Jokowi termasuk sebagai bagian dari masalah dalam sistem pemilu 2024. Dengan teknik kamera *medium close-up*, penonton dapat melihat ekspresi serius dari ketiga pakar hukum tata negara. *Low key lighting* digunakan untuk menciptakan atmosfer tegang, menegaskan bahwa presiden harus bertanggung jawab secara moral atas keadaan politik yang ada.

Adegan kedua menampilkan berbagai pemberitaan mengenai Presiden Jokowi untuk mem-*framing* Jokowi sebagai aktor politik utama Pemilu 2024.



Scene 2 time code (1:20-5:08).

Pemberitaan tentang Jokowi, seperti deklarasi Prabowo-Gibran yang menggunakan *low angle*, menciptakan kesan otoritas. Ketika Jokowi menyatakan bahwa "presiden boleh berpihak", ia digambarkan berdiri di sebelah Prabowo daripada seluruh layar berita, yang menciptakan persepsi bahwa film ini menunjukkan Jokowi mendukung Prabowo. Film ini menciptakan ketegangan emosional yang kuat dan membuat penonton merasa ada yang "tidak netral" dalam kepemimpinan Presiden karena *background* yang menegangkan.

Adegan ketujuh mengenai penunjukan PJ sebagai bentuk dominasi wilayah oleh Presiden.



Scene 7 Time Code (16:46-21:17)

Setelah membahas strategi sebaran wilayah, kata Feri Amsari, saatnya untuk mendiskusikan "siapa penguasanya". Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menunjuk dua puluh juru bicara gubernur dan dua puluh dua juru bicara walikota atau bupati sejak 2021. Peta Indonesia didominasi warna oranye dan merah, menunjukkan betapa luasnya wilayah yang saat ini dipimpin oleh pejabat yang dipilih oleh presiden.

Visual diperkuat dengan gambar lebih dekat dari bagan hubungan kekuasaan, yang menampilkan Presiden Jokowi di pusat bersama dengan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Menurut cerita, banyak dari pejabat tersebut memiliki hubungan dekat dengan Jokowi, yang meningkatkan kemungkinan pengaruh politik dalam Pemilu. Prinsip netralitas, yang seharusnya menjaga agar tidak ada intervensi politik dalam proses pemilu, dapat terganggu jika pejabat daerah ditunjuk dengan kedekatan dengan pemerintah pusat (Moser & Scheiner, 2004). Feri menegaskan bahwa penunjukan ini bahkan dianggap melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi karena dilakukan tanpa proses transparan. Ia menyebut bahwa 140 juta DPT berada di bawah wilayah-wilayah tersebut, jumlah yang mencukupi syarat kemenangan satu putaran yaitu $50\% + 1$.

Adegan keenam mengenai ketidaknetralan Presiden Jokowi.



Scene 16 Time Code (52:18-56:47)

"Apakah Presiden harus netral?", kata netral diperbesar dan ditebalkan oleh Bibit Susanti. Ia menyatakan bahwa presiden dapat berkampanye, tetapi dengan beberapa syarat, termasuk cuti yang tidak boleh menguntungkan atau merugikan paslon tertentu. Setelah Bivitri mengatakan, "mari kita lihat prakteknya", suasana belakang yang menegangkan mulai dimainkan, membuat penonton menjadi lebih tegang saat melihat "praktek" yang dia maksudkan. Lalu, Bibit menampilkan foto Jokowi di banner kampanye paslon kedua, di mana konsolidasi besar PSI yang dipimpin oleh Kaesang, anak Jokowi, menampilkan foto Gibran, menciptakan kesan politik dinasti. Selain itu, Bibit menampilkan foto makan siang Jokowi bersama tiga menteri dari koalisi kedua, Prabowo Subianto, Airlangga Hartanto, dan Zulkifli Hasan, tanpa kehadiran menteri dari koalisi lain. Gestur politik yang ditampilkan oleh pejabat negara sering kali berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik, yang dapat merusak prinsip netralitas dalam sistem demokrasi (Bates, 2012).

Close-up wajah Bivitri saat ia menanyakan: "mengapa menteri-menteri dari paslon lain tidak diperlakukan sama?", memperkuat kesan bahwa Jokowi

berpihak pada paslon tertentu, dan hal ini melanggar etika netralitas. Bivitri juga menyebut dua berita penting yaitu pertama, Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye yang mana saat itu Presiden Jokowi tengah berdiri di lapangan udara milik negara, di depan alutsista milik negara. Kedua, pemberitaan mengenai Iriana Jokowi mengacungkan dua jari didalam mobil kepresidenan, isyarat keberpihakan pada paslon 02. Kedua pemberitaan tersebut menurut Bivitri, hal ini telah melanggar syarat berkampanye, yaitu menggunakan fasilitas negara). Selain itu, *Dirty Vote* menandai bagian ini dengan judul scene “Presiden Tidak Netral”, menjadikan ini sebagai vonis representatif terhadap Jokowi dalam konteks Pemilu 2024.

Adegan kedua puluh dua adalah *closing statement* mengenai kecurangan terstruktur dan sistematis oleh kekuatan 10 tahun terakhir.



Scene 22 Time Code (1:53:36-1:57:12)

Feri menegaskan bahwa kecurangan ini tidak terjadi dalam semalam dan tidak dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh kelompok yang telah berkolaborasi selama sepuluh tahun terakhir, yang merujuk pada Presiden Jokowi. Wajahnya yang lebih dekat ditampilkan dengan ekspresi tegas dan kecewa. Zainal kemudian menyatakan bahwa mereka yang memegang

kekuasaan tertinggi yang mengatur aparatur dan anggaran negara bertanggung jawab atas pembuatan kecurangan, yang juga merujuk pada Presiden Jokowi. Bibitri menambahkan bahwa kecurangan ini disebabkan oleh "mental culas dan tahan malu", menunjukkan ekspresi wajah kecewa dengan teknik close-up. Visual terakhir menampilkan berbagai berita tentang keluarga Jokowi (Gibran, Bobby, dan Kaesang), pernyataannya bahwa dia akan melakukan "cawe-cawe" dalam pemilu, dan kekuatan yang dia miliki sebagai Presiden Indonesia. Ketika *closing statement* ini, terdapat *backsound* yang sedih sehingga menyentuk perasaan penonton ditambah dengan *closeup* ekspresi ketiga pakar yang terlihat kecewa. Pada bagian *credit scene*, yaitu pada bagian *collaborator* terdapat "Salam 4 Jari", mewakili aliansi paslon 01 & 03, menimbulkan pertanyaan atas netralitas film namun mempertegas bahwa film ini hendak mengkritik arah kekuasaan yang memenangkan paslon 02.

3.2 Strategi Kemenangan Satu Putaran dalam Pemilu 2024 melalui

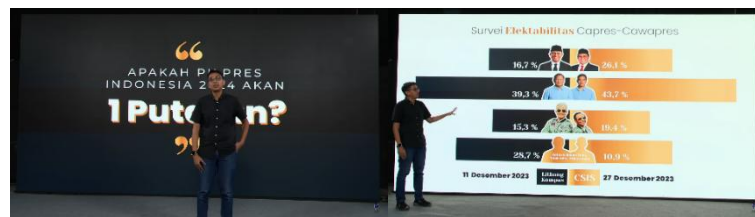
Dominasi Politik dan Kontrol Kekuasaan

Sebagai kontestasi politik, pemilu 2024 dirancang dengan teliti untuk memungkinkan paslon yang mendukung Presiden Jokowi menang satu putaran. Representasi ini dibangun melalui paparan data tentang elektabilitas, sejarah politik sebelumnya (misalnya, Pilkada DKI), dan pembagian kekuasaan melalui penunjukan pejabat strategis dan cerita tentang bagaimana mereka menguasai wilayah tersebut.

Salah satu tema yang muncul adalah Strategi Kemenangan Satu Putaran melalui kontrol kekuasaan politik. Dalam strategi ini, Presiden Jokowi

digambarkan memiliki peran besar dalam membangun peta kemenangan melalui kekuatan struktural (pengangkatan pejabat), kekuatan simbolik (gambaran politik dan visual), dan kekuatan naratif (pembentukan opini publik melalui narasi pakar dan media).

Adegan ketiga mengenai framing politik kemenangan satu putaran.



Scene 3 Time Code (5:20-7:10)

Scene ini menampilkan Zainal dengan gaya yang retoris dan penuh gestur simbolik. Ia membuka narasi dengan kalimat bahwa pemilu tinggal sebentar lagi, disampaikan dengan nada seolah mengejek, sambil menahan tawa kecil. Di belakangnya muncul tulisan besar “Apakah Pilpres Akan Satu Putaran?”, dengan kata “satu putaran” diperbesar dan dipertebal, menarik perhatian audiens secara visual terhadap target utama film yaitu kemenangan satu putaran sebagai agenda utama kekuasaan. Kemudian tampil data survei elektabilitas dari Litbang Kompas yang menempatkan paslon 02 di posisi teratas. Zainal menyebut dengan tegas, “emang paslon 02, yang di situ ada anak presiden, sedang memimpin,” mempertegas keterlibatan kekuasaan dalam kompetisi ini.

Zainal menambahkan bahwa pihak yang memimpin survei ini “getol ingin satu putaran,” dan menjelaskan bahwa putaran kedua bisa menjadi titik balik yang berbahaya bagi mereka. Narasi ini mengarahkan audiens pada logika

bahwa kemenangan satu putaran bukan soal elektabilitas semata, tapi soal mempertahankan dominasi sebelum kekuatan oposisi sempat bersatu. Lalu muncul pembelahan politik yang menjadi inti ideologis film ini, Zainal menyebut bahwa pertarungan Pilpres 2024 dibingkai sebagai konflik antara pihak yang “menjual kelanjutan” pemerintahan saat ini dan pihak yang “menjual perubahan.” Zainal menyebut, “antara orang yang jualannya adalah melanjutkan yang terdahulu, dengan orang yang jualannya ingin melakukan perubahan atau perbaikan.”

Visual dan narasi ini membentuk polaritas politik yaitu pro status quo (Prabowo-Gibran sebagai simbol kelanjutan kekuasaan Jokowi), dan pro perubahan (Anies dan Ganjar sebagai representasi penantang kekuasaan lama). Pro status quo merujuk pada mereka yang ingin mempertahankan kebijaksanaan yang sudah ada, yaitu kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi (BRENNAN & HAMLIN, 2004). Framing ini sangat penting karena menegaskan bahwa pemilu bukan hanya soal calon, tapi soal arah negara, apakah kekuasaan yang telah berkuasa selama 10 tahun akan terus berlanjut, atau rakyat akan memilih jalan perubahan. Dalam konteks itu, satu putaran diposisikan sebagai alat untuk mengunci kekuasaan sebelum oposisi sempat menyatu.

Adegan keempat mengenai referensi Pilkada DKI.



Scene 4 Time Code (7:11-8:44)

Zainal membandingkan strategi ini dengan Pilkada DKI 2017. Ia menyebut pasangan Ahok-Djarot (yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi) kalah di putaran kedua karena bersatunya kekuatan penantang. Meskipun tidak ada bukti eksplisit keterlibatan Presiden, pengaitannya dibentuk dengan narasi: “yang lagi-lagi didukung oleh presiden harus kalah.” Analogi ini digunakan untuk memperkuat gagasan bahwa jika Prabowo-Gibran tidak menang di putaran pertama, maka kemungkinan besar kekuatan penantang dari paslon 01 dan 03 dapat bersatu dan mengalahkan mereka. Hal ini semakin memperjelas bahwa strategi satu putaran adalah harga mati bagi kekuatan yang saat ini berkuasa.

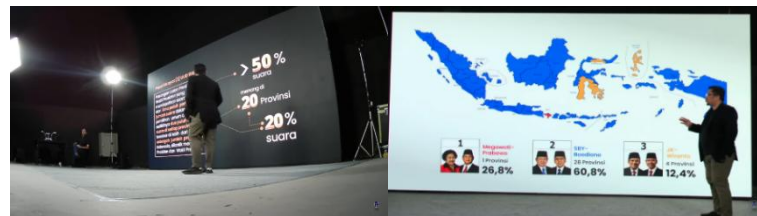
Adegan kelima mengenai gerakan “Salam Empat Jari” sebagai simbol ancaman terhadap status quo.



Scene 5 Time Code (08:45-09:19)

Gerakan "Salam Empat Jari" ditampilkan sebagai simbol aliansi paslon 01 dan 03. Zainal menyebut gerakan ini sebagai "tawaran", yang memperlihatkan bahwa persatuan kekuatan oposisi adalah upaya sistemik untuk menggulingkan dominasi paslon 02. Simbol ini menjadi gambaran bahwa potensi dua putaran adalah celah yang harus ditutup oleh kekuasaan, karena persatuan oposisi dapat menjungkirbalikkan hasil pemilu.

Adegan keenam paparan teknis strategi wilayah dan aliansi kekuatan.



Scene 6 Time Code (09:25-15:22)

Feri menjelaskan syarat kemenangan satu putaran dengan merujuk pada Pasal 6A ayat 3 UUD 1945. Ia menunjukkan peta sebaran wilayah dari pemilu sebelumnya, serta sejarah kemenangan pasangan SBY–Boediono dalam satu putaran, disertai visual dominasi warna biru di wilayah Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa menang satu putaran tidaklah mudah, meskipun Pulau Jawa memiliki populasi sebesar 115 juta suara (ditulis besar dan ditebalkan dalam visual), jumlah provinsinya hanya enam, sehingga tidak cukup untuk memenuhi syarat sebaran wilayah. Sumatera, dengan sepuluh provinsi, disebut sebagai wilayah penentu dalam strategi kemenangan.

Narasi kemudian berkembang dengan menyoroti penggabungan kekuatan antara Jokowi dan Prabowo. Muncul tulisan besar “Bagaimana Ketika Jokowi–Prabowo Bersatu di Pilpres 2024?”, disusul dengan data dari CSIS yang

menunjukkan dominasi paslon 02, terutama di wilayah Papua. Feri menyoroti keanehan bahwa provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Papua langsung dilibatkan dalam Pemilu 2024, berbeda dengan Kalimantan Utara yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sejak berdiri untuk bisa ikut pemilu. Visualisasi ini membentuk persepsi bahwa mekanisme hukum dan administrasi dapat diarahkan secara strategis untuk memperkuat peluang kemenangan.

Secara teoritis, sistem pemilu di negara-negara demokratis sangat bergantung pada distribusi suara di wilayah-wilayah tertentu (Lijphart, 1994). Oleh karena itu, dalam praktiknya, pemimpin politik biasanya memanfaatkan pejabat atau tokoh berpengaruh di wilayah tertentu untuk memobilisasi dukungan, sehingga kendali atas wilayah strategis menjadi krusial dalam desain kemenangan politik (Scott, 1972). Dalam konteks ini, strategi satu putaran yang ditampilkan dalam film *Dirty Vote* tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga struktural dan administratif, yang dibangun di atas kalkulasi wilayah, jumlah provinsi, dan distribusi kekuasaan.

3.3 Ketidaknetralan Pejabat Negara dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai Instrumen Kemenangan dalam Pemilu 2024

Pemilu 2024 direpresentasikan sebagai pemilu yang tidak adil karena dipenuhi oleh ketidaknetralan pejabat negara dan penyalahgunaan kekuasaan secara sistemik dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui tayangan dokumenter yang menyoroti tindakan PJ Gubernur, Bupati, kepala desa, hingga menteri kabinet, film ini membangun narasi bahwa kekuasaan negara digunakan untuk mengarahkan dukungan politik, bukan menjaga proses demokrasi yang sehat.

Representasi ini dibangun dengan visual dan data tentang pejabat yang mendukung paslon secara terbuka, kepala desa sebagai kekuatan politik yang dikoordinasi untuk mendukung paslon tertentu, hingga menteri kabinet Jokowi yang diduga menggunakan fasilitas negara dalam kampanye politik. Semua ini menyiratkan bahwa ada struktur kekuasaan yang mengaburkan batas antara pemerintah dan kekuatan politik elektoral, yang seharusnya netral dalam demokrasi.

Film menampilkan berbagai adegan yang menunjukkan struktur kekuasaan negara diarahkan untuk memperkuat dominasi elektoral, dan mengaburkan batas antara pemerintah dan kekuatan politik praktis. Data visual, rekaman pernyataan publik, pemberitaan media, hingga bukti-bukti simbolik memperkuat bahwa kekuasaan dijalankan secara tidak netral dan bahkan digunakan sebagai alat tukar politik. Tema utama yang muncul adalah "Ketidaknetralan Pejabat dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai Instrumen Kemenangan dalam Pemilu 2024." Tema ini muncul melalui beragam scene yang menampilkan:

Adegan kedelapan mengenai PJ Gubernur dan ketidaknetralan struktural.



Scene 8 Time Code (21:23-24:07)

Feri menyampaikan narasi bahwa relasi politik antara pusat dan daerah melalui penunjukan Penjabat Gubernur dapat menimbulkan ketidaknetralan. Visual menampilkan cuplikan video bertuliskan "PJ Gubernur Tidak Netral" di Kalimantan Barat, yang menyerukan dukungan kepada paslon yang pro-IKN (paslon 02). Pejabat negara yang terlibat mendukung kandidat tertentu dapat merusak integritas dan transparansi pemilu (Moser & Scheiner, 2004). Di sisi lain, pemberitaan tentang pencopotan baliho paslon Ganjar-Mahfud juga ditampilkan, dan Feri menggarisbawahi adanya perintah dari PJ Gubernur untuk mencopot alat peraga tersebut.

Pakta integritas yang ditampilkan secara close-up menunjukkan target memenangkan Ganjar sebesar 60% di daerah tertentu. Meskipun ada video dukungan terhadap Ganjar, narasi tetap diarahkan bahwa pejabat daerah digunakan secara politis baik secara langsung maupun terselubung untuk mengarahkan dukungan.

Adegan kesembilan mengenai perlakuan tidak seimbang antar kandidat.



Scene 9 Time Code (24:10-25:33)

Feri menyoroti ketidaknetralan lebih lanjut melalui dua pemberitaan kontras yaitu Bobby Nasution (menantu Presiden Jokowi) terlihat berkampanye untuk paslon 02, sedangkan Anies Baswedan mengalami penolakan izin kampanye di

enam lokasi. Kontras ini memperlihatkan bahwa kandidat yang memiliki hubungan dengan kekuasaan mendapatkan kemudahan akses, sementara kandidat lain dipersulit, menguatkan representasi bahwa akses politik dikendalikan secara tidak setara.

Adegan kesepuluh mengenai politisasi kepala desa dan potensi mobilisasi massal.



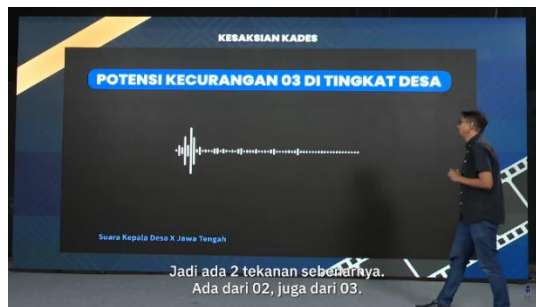
Scene 10 Time Code (25:34-30:38)

Scene ini menunjukkan deklarasi Desa Bersatu di GBK, dihadiri oleh Gibran dan diikuti oleh delapan organisasi desa. Zainal menyebut angka 81 juta pemilih desa, sepertiga dari DPT nasional, yang divisualisasikan melalui peta dan angka besar. Hal ini memperkuat persepsi bahwa mobilisasi kepala desa bukan sekadar simbolik, tetapi sarana strategis untuk mengamankan suara rakyat desa secara sistematis.

Zainal juga menunjukkan bahwa kepala desa menjadi subjek dan objek politisasi, dibuktikan melalui cuplikan kericuhan dalam demonstrasi tuntutan revisi UU Desa dan berita janji Presiden Jokowi soal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pernyataan Zainal, "cukup banyak dijanjikan hal-hal

tertentu," diperkuat dengan tayangan berita dari Kompas, menunjukkan bahwa kepala desa dijadikan alat negosiasi politik.

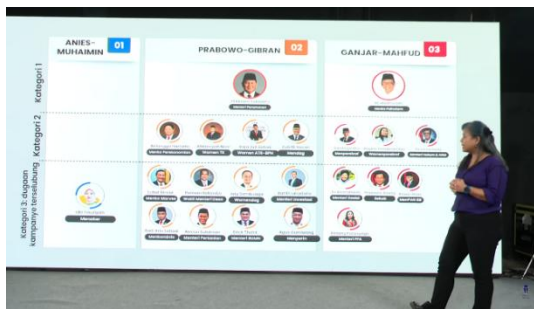
Adegan kesebelas mengenai penyalahgunaan dana desa dan tekanan politik.



Scene 11 Time Code (30:39-33:37)

Zainal menampilkan grafik APBDes yang diselewengkan, dengan narasi bahwa dana tersebut “sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar politik”. Visual tangan Zainal yang menekankan poin tersebut memberi kesan bahwa sumber daya fiskal desa menjadi alat transaksional dalam mendukung paslon tertentu. Rekaman percakapan yang menyebut bahwa paslon 02 dan 03 harus dimenangkan, serta tuduhan manipulasi bansos dan tekanan dari pihak kepolisian, menggambarkan bahwa pejabat desa tidak hanya dikondisikan, tetapi ditekan secara struktural untuk berpihak.

Adegan kelima belas mengenai keterlibatan menteri kabinet dan penyalahgunaan fasilitas negara.



Scene 15 Time Code (43:54-52:17)

Bivitri menyoroti keterlibatan para menteri dalam kampanye politik, khususnya dari tim kampanye paslon 02. Ia menyebut bahwa beberapa menteri tidak menjalankan kewajiban kampanye seperti cuti, serta menggunakan fasilitas negara seperti pesawat TNI AU dan akun media sosial resmi pemerintah. Ketika pejabat negara terlibat langsung dalam kampanye politik tanpa mengindahkan aturan, hal itu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem politik dan menciptakan ketimpangan kekuatan antara partai-partai yang bersaing (Muller, 2013).

Bivitri juga menunjukkan ketidaknetralan dalam tayangan video kampanye oleh Bahlil dan pemberitaan tentang Erick Thohir yang berkampanye untuk paslon 02, meskipun keduanya tidak tercatat secara resmi dalam daftar tim kampanye KPU. Di sisi lain, kehadiran Yasonna Laoly dan Risma dalam kampanye paslon 03 disorot lebih ringan, bahkan disampaikan bahwa belum ada kepastian apakah mereka benar ikut kampanye.

Narasi ditutup dengan tayangan video Luhut secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo, menegaskan bahwa mayoritas ketidaknetralan pejabat tinggi negara justru datang dari lingkaran kekuasaan paslon 02. Teknik visual close-up pada wajah Bivitri yang ekspresif dan

kecewa memperkuat representasi bahwa pejabat negara tidak menjalankan fungsi kenegaraan secara imparial.

3.4 Politisasi Bansos dan Strategi Populis sebagai Alat Kemenangan

Elektoral dalam Pemilu 2024

Film *Dirty Vote* merepresentasikan Pemilu 2024 sebagai pemilu yang dikendalikan secara politis melalui politisasi bantuan sosial yang dilakukan secara sistematis oleh pejabat negara, menteri kabinet, dan elite politik yang berafiliasi dengan Presiden Jokowi. Representasi ini disampaikan melalui pemberitaan, karikatur, data grafik bansos, dan framing visual yang menunjukkan bagaimana bansos digunakan sebagai alat politik untuk mendukung paslon tertentu, terutama paslon 02.

Tema utama yang dibangun adalah politisasi Bansos dan Strategi Populis sebagai Alat Kemenangan Elektoral dalam Pemilu 2024, dengan fokus pada bagaimana kenaikan anggaran bansos, distribusinya yang tidak merata, dan keterlibatan langsung pejabat negara menunjukkan upaya sistematis untuk mengarahkan kemenangan kandidat tertentu melalui strategi populistis dan penyalahgunaan sumber daya negara.

Adegan kedua belas mengenai bansosn yang digunakan sebagai alat kampanye terang-terangan.



Scene 12 Time Code (34:04-35:08)

Bivitri menampilkan pemberitaan dari Metro TV berjudul *“Politisasi Bansos Makin Parah: Penerima Diminta Dukung Anak Jokowi”*, yang menampilkan Menteri Zulkifli Hasan membagikan bansos bersama partainya (PAN) sambil menyerukan dukungan kepada Gibran. Hal ini menunjukkan bahwa praktik politisasi bansos tidak lagi tersembunyi, melainkan dilakukan secara terbuka oleh pejabat negara.

Selanjutnya, ditampilkan pemberitaan dari CNN mengenai Menteri Airlangga Hartarto yang membagikan bansos di NTB sambil meminta warga penerima menyebutkan, “Terima kasih Pak Jokowi.” Ini memberikan kesan seolah bansos tersebut berasal langsung dari Presiden, padahal seharusnya merupakan program negara untuk rakyat secara umum. Visual dan narasi ini membentuk representasi bahwa bansos telah direkayasa sebagai alat propaganda politik kekuasaan.

Adegan ketiga belas mengenai statistik anggaran bansos.



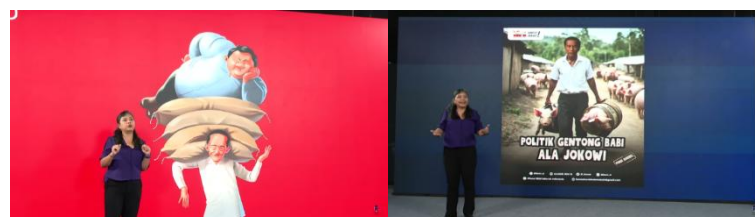
Scene 13 Time Code (35:09-38:23)

Bivitri memperlihatkan data statistik anggaran bansos yang ditampilkan dalam bentuk visual tumpukan uang. Menjelang Pemilu, terjadi lonjakan anggaran bansos secara drastis, dengan perbedaan warna grafik yaitu perak

untuk tahun pemilu, emas untuk tahun non-pemilu. Gambar tumpukan uang tersebut memudahkan audiens menangkap kesan bahwa anggaran bansos sengaja ‘dimeriahkan’ saat pemilu. Politisasi bansos adalah cara efektif untuk membeli suara pemilih dengan menawarkan imbalan langsung, terutama menjelang pemilu (Kitschelt, 2000).

Selanjutnya ditampilkan grafik berbentuk roket dengan narasi “WOOSH!” yang secara simbolik menggambarkan lonjakan ekstrem anggaran menjelang 2024. Tayangan ini diperkuat dengan judul “Uang Kaget 2024” serta data jumlah penerima bansos 18,8 juta yang awalnya ditulis sebagai “suara”, lalu dicoret dan diganti menjadi “KK (Kepala Keluarga)”. Penyuntingan ini menyiratkan kritik tajam bahwa bansos digunakan sebagai ‘alat beli suara’. Pemilihan kata atau istilah dalam suatu narasi dapat memengaruhi persepsi audiens mengenai tujuan dan kepentingan yang ada dibalik hal tersebut (Snow & et al, 1986). Gambar uang yang dihamburkan memperkuat kesan bahwa dana bansos digunakan secara boros dan disengaja untuk memenangkan simpati publik melalui pendekatan populis. Narasi ini bahkan dikaitkan dengan bansos era Covid-19, yang disebut Bivitri tetap dimanipulasi secara politis.

Adegan keempat belas mengenai visual sindiran, karikatur, dan politik anggaran.



Scene 14 Time Code (38:24-43:26)

Scene ini menampilkan berbagai bentuk kritik visual. Bivitri menunjukkan karikatur Presiden Jokowi sedang berjoget sambil menggendong karung bansos, dengan Prabowo tiduran di atasnya sambil tersenyum. Warna merah sebagai latar memperkuat simbolisasi “keberanian” dan “kekuatan politik”. Visual ini merepresentasikan bahwa Jokowi menggunakan bansos untuk mengangkat citra paslon penerusnya.

Bivitri mempertanyakan: *“Apakah ini upaya meningkatkan kesejahteraan atau sekadar populisme belaka?”* Ia menampilkan fakta bahwa kenaikan gaji buruh sangat kecil dibandingkan TNI, Polri, dan pensiunan. Layar menampilkan narasi bahwa bansos seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik, dan distribusinya harus melalui struktur resmi yaitu Menteri Sosial. Namun, Bivitri menyebut bahwa Menteri Sosial berasal dari PDIP, partai yang kini berada dalam posisi politik berseberangan dengan Presiden Jokowi. Tensi narasi ditingkatkan dengan musik latar sendu dan penayangan peta berjudul *“Sebaran Bansos oleh Jokowi.”* Judul ini menyiratkan bahwa bansos bukan dari negara, tetapi dari Presiden untuk kepentingan politik penerusnya.

Bivitri juga menampilkan berita mengenai Kapolri yang membagikan bansos sambil mengarahkan masyarakat untuk memilih “penerus Jokowi”, serta karikatur Jokowi membawa gentong berisi babi, simbol dari praktik *“pork barrel politics”* di mana anggaran digelontorkan ke wilayah strategis demi

dukungan elektoral. Gerakan tangan Bivitri yang membuat tanda kutip saat menyebut kata “resmi” menambah kesan sindiran bahwa jabatan resmi seringkali disalahgunakan demi kenyamanan pribadi. Karikatur yang menggambarkan Jokowi menggendong gentong bertuliskan "Bansos" dan babi, merujuk pada *pork barrel politics*, yaitu penggunaan anggaran negara untuk proyek yang menguntungkan pemilih demi dukungan elektoral (Adilansyah, Firmansyah, Kamaluddin, Sauki, & Hidayat, 2024).

Ia menutup dengan narasi tajam: “*Kali ini, Jokowi memang tidak meminta masyarakat memilih dirinya, karena yang dimajukan adalah penerusnya.*” Hal ini menegaskan bahwa politisasi bansos tidak lagi bertujuan mempertahankan kekuasaan personal, tetapi untuk memastikan keberlanjutan politik melalui penerus yang diresmikan kekuasaan. Kebijakan populis sering digunakan oleh pemerintah untuk memperkuat posisi politik mereka dengan cara memberikan manfaat langsung kepada kelompok-kelompok yang penting bagi kemenangan elektoral (Kaufman, 2004).

3.5 Kontroversi dan dugaan manipulasi proses hukum oleh Mahkamah

Konstitusi

Pemilu 2024 direpresentasikan sebagai proses yang dianggap legal atau resmi karena keputusan hukum, walaupun keputusannya diragukan kebenarannya. Melalui keputusan hukum yang kontroversial dan penuh konflik kepentingan, di mana Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi institusi netral, melainkan dianggap tunduk pada kepentingan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi (MK), yang semestinya menjadi institusi netral dalam menegakkan

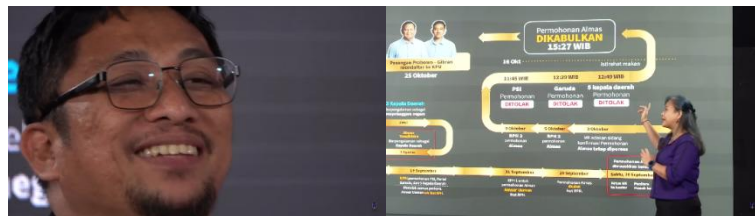
konstitusi, justru ditampilkan sebagai aktor kunci yang tidak independen, melainkan tunduk pada kepentingan politik tertentu. Representasi ini ditunjukkan melalui narasi visual, ekspresi emosional para narator, dan kronologi peristiwa yang menggambarkan bagaimana keputusan MK mengalami perubahan secara drastis dan mencurigakan. Mahkamah Konstitusi direpresentasikan sebagai lembaga yang kehilangan integritas dan tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi. Ia ditampilkan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang melayani kepentingan politik tertentu, terutama dalam kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres

Tema utama dari dua scene ini adalah "Krisis Integritas Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Pemilu: Antara Intervensi Politik dan Konflik Kepentingan." Tema ini menyoroti lemahnya independensi lembaga peradilan dalam menghadapi tekanan kekuasaan, khususnya dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini tidak hanya memunculkan kontroversi, tetapi juga memperkuat dugaan bahwa hukum telah dimanipulasi untuk kepentingan politik dinasti, terutama karena adanya hubungan keluarga antara Ketua MK dan salah satu calon. Melalui visualisasi grafik, narasi tajam dari ketiga pakar, dan penggunaan teknik sinematik yang menekankan ekspresi emosional dan atmosfer serius, film ini membangun kritik terhadap proses hukum yang dianggap cacat secara etika dan transparansi. Perubahan sikap hakim setelah "makan siang" menjadi simbol dari hilangnya prinsip akuntabilitas. Tema ini mencerminkan puncak dari krisis demokrasi, ketika

hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan bagian dari strategi kekuasaan.

Konflik kepentingan terlihat sangat jelas melalui sosok Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden dari paslon 02. Film memperlihatkan bahwa sebanyak 31 permohonan terkait ambang batas usia calon presiden/wakil presiden sebelumnya ditolak. Namun, tiba-tiba satu permohonan dikabulkan setelah momentum yang digambarkan sebagai "makan siang", yang menjadi simbol terjadinya kesepakatan tersembunyi.

Adegan kedua puluh mengenai konflik kepentingan dan krisis integritas hukum.



Scene 20 Time Code (1:17:49-1:39:41)

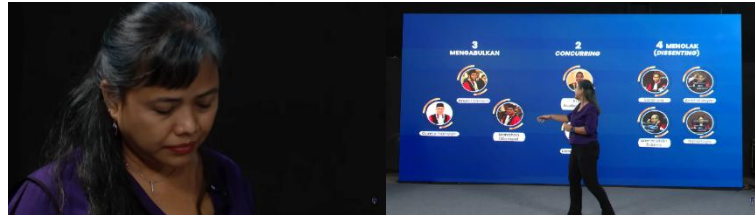
Scene 20 menampilkan Bivritri yang menyebut bahwa perubahan keputusan tersebut merupakan puncak kecurangan pemilu karena kontradiksi yang sangat nyata yaitu puluhan permohonan ditolak, tapi satu permohonan yang mirip malah dikabulkan. Ia menyebutkan 11 poin kontroversi, dengan penekanan kata kunci di setiap poin, termasuk pengajuan permohonan saat hari libur, keputusan yang berlaku instan tanpa penundaan, serta pelanggaran etik berat oleh Ketua MK. Dalam close-up ekspresif, Bivritri menyoroti bahwa pengajuan

ulang permohonan oleh Almas dilakukan di hari libur, sementara Anwar Usman justru ikut kembali dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) setelah sebelumnya absen.

Ketiganya, Zainal, Feri, dan Bivitri menggambarkan kekhawatiran mereka atas perubahan keputusan tersebut. Feri menyebut bahwa ia tertidur setelah makan siang, bahagia karena yakin permohonan akan ditolak, namun kaget saat bangun bahwa permohonan dikabulkan. Bivitri bahkan menyebut bahwa media nasional telah menulis bahwa Gibran adalah "anak haram konstitusi", merujuk pada produk hukum yang dianggap cacat secara prosedural dan etika.

Narasi diperkuat dengan penggunaan visual seperti penandaan warna merah untuk keputusan yang dianggap sarat konflik kepentingan, dan penandaan hijau untuk opini hakim yang dianggap objektif. Zainal menyatakan bahwa perubahan posisi hakim dari pra dan pasca makan siang mengindikasikan adanya lobi-lobi atau komunikasi tidak resmi yang mempengaruhi keputusan. Feri menambahkan bahwa perubahan frasa dari "pernah menjabat" menjadi "pernah atau sedang menjabat" merupakan manipulasi hukum yang memungkinkan Gibran yang masih menjabat sebagai walikota untuk maju sebagai cawapres.

Adegan kedua puluh satu membahas mengenai hakim terbelah, MK tunduk pada tekanan politik.



Scene 21 Time Code (1:39:42-1:53:35)

Scene 21 memperlihatkan tayangan pendaftaran paslon Prabowo-Gibran ke KPU yang disambut meriah oleh masyarakat pendukung. *Close-up* wajah ketiga narator memperlihatkan ekspresi kecewa dan sedih, memperkuat sisi emosional dari narasi bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam kondisi krisis. Bivitri menegaskan bahwa keputusan MK hanya dibuat demi membuka jalan bagi Gibran, dan bahwa ketidaknetralan hakim serta manipulasi hukum adalah bentuk konkret dari krisis integritas konstitusional.

Zainal menambahkan bahwa *dissenting opinion* dari beberapa hakim berisi "sumpah serapah" yang menunjukkan kemarahan dan kegendahan. Hal ini memperkuat pesan bahwa proses hukum tidak lagi objektif, dan bahwa hukum digunakan sebagai alat kekuasaan. Pernyataan akhir "putusan itu baunya anyir" menjadi metafora dari rusaknya proses hukum dalam pemilu 2024.

Dengan demikian, *Dirty Vote* menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui aktor-aktornya, telah menjadi bagian dari strategi kekuasaan yang merusak fondasi demokrasi Indonesia.

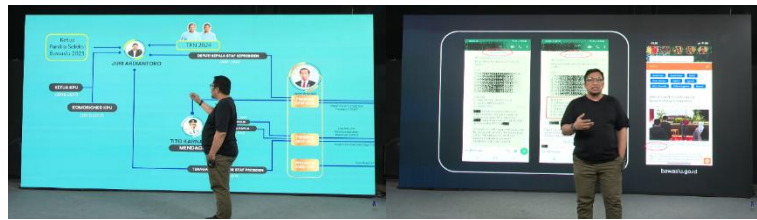
3.6 Kemunduran Lembaga Negara dan Penyimpangan Pemilu oleh Aparat Resmi

Pemilu 2024 dalam film *Dirty Vote* direpresentasikan sebagai proses yang telah dimanipulasi oleh lembaga resmi negara, di mana Bawaslu dan KPU tidak lagi berfungsi sebagai penjaga demokrasi, melainkan sebagai aktor pasif bahkan kolaboratif dalam praktik politik dinasti dan oligarki. Film ini menyampaikan bahwa Bawaslu kehilangan independensinya meskipun memiliki kewenangan hukum, dan hanya memberikan sanksi ringan yang tidak berdampak. Sementara itu, KPU justru terlibat dalam dugaan manipulasi administratif, termasuk memanipulasi proses verifikasi partai politik untuk kepentingan strategis paslon tertentu, serta melanggar etika dalam isu keterwakilan perempuan dan konflik kepentingan pribadi oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Representasi ini semakin kuat melalui ilustrasi visual yang menunjukkan grafik data yang timpang, serta karikatur politik seperti adegan Gibran digendong Anwar Usman dengan teks "tak gendong kemana-mana". Hal ini menggambarkan bahwa penyimpangan tidak hanya terjadi di level pengambilan keputusan makro seperti Mahkamah Konstitusi, tetapi juga di tingkat teknis pelaksanaan oleh lembaga pelaksana pemilu.

Tema utama dari representasi ini adalah kemunduran institusi negara dan penyimpangan pemilu oleh aparat resmi. Bawaslu dan KPU yang semestinya netral justru menjadi bagian dari persoalan, bukan solusi. Konflik kepentingan dibiarkan terbuka, baik melalui keberpihakan terhadap paslon tertentu, maupun dalam pemenuhan kuota representasi gender yang diabaikan. Shadow party dan strategi rekayasa sistemik untuk memecah suara oposisi turut menjadi sorotan,

menunjukkan bagaimana kekuasaan menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik dinasti.

Adegan ketujuh belas tentang kritik Feri terhadap Bawaslu, lembaga pengawas kehilangan fungsi demokratis.



Scene 17 (56:53-1:03:50)

Scene 17 memperlihatkan Feri Amsari menyatakan bahwa "Bawaslu sudah tidak kompeten lagi". Musik tegang yang perlahan menghilang menciptakan ketegangan dan memperkuat narasi. Tayangan berita tentang Gibran menghadiri acara APDESI menjadi simbol dari kegagalan Bawaslu menindak pelanggaran, dengan Feri mempertanyakan keberanian Bawaslu hanya memberikan sanksi teguran. Penonton diarahkan pada opini bahwa keberadaan Gibran membuat aparat pengawas pemilu menjadi gentar.

Feri juga menunjukkan bukti adanya ketidakwajaran dalam proses seleksi anggota Bawaslu, di mana seorang anggota disebut pernah menjadi bagian dari TKN Jokowi dan kini menjadi anggota TKN Prabowo-Gibran. Ia juga menampilkan tangkapan layar grup WhatsApp yang menunjukkan nama-nama anggota Bawaslu sudah ditentukan sebelum proses seleksi berakhir, membangun narasi kuat tentang kolusi dan kepentingan politik dalam tubuh pengawas pemilu. Pengawasan yang tidak tegas terhadap pelanggaran pemilu

dapat menyebabkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga negara, yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi (Synder, 2010).

Adegan kedelapan belas mengenai legitimasi pemilu direkayasa melalui jalur administratif.



Scene 18 (01:04:03-1:11:55)

Scene 18 memperlihatkan manipulasi dalam verifikasi partai politik, seperti Partai Gelora yang awalnya tidak memenuhi syarat, namun kemudian dinyatakan lolos oleh KPUD Murung Raya. Bukti-bukti manipulasi diperlihatkan dengan *highlight* pada dokumen, dan narasi Zainal Arifin Mochtar yang menggiring opini bahwa Partai Gelora dimanfaatkan untuk memecah suara PKS, karena memiliki basis pemilih yang sama. *Shadow party theory* dipaparkan di sini, yakni strategi pembentukan partai bayangan untuk membelah suara lawan politik. *Shadow party*, menurut Fishkin dan Gerken, adalah kelompok yang beroperasi di luar struktur resmi partai politik tetapi memiliki hubungan erat, seperti mengorganisir donor dan kampanye, serta memengaruhi kebijakan dan kandidat (Fishkin & Gerken).

Contoh lain ditunjukkan dengan keberadaan Partai Ummat dan PAN yang bersaing untuk suara basis Muhammadiyah, serta PKN yang dibentuk oleh

Anas Urbaningrum dianggap sebagai oposisi terhadap Demokrat. Semua ini digambarkan sebagai upaya sistematis elite kekuasaan untuk melemahkan kekuatan oposisi.

Adegan kesembilan belas mengenai konflik kepentingan dan ketidakadilan struktural dalam sistem pemilu.



Scene 19 Time Code (1:11:56-1:17:48)

Scene 19 menunjukkan rekaman suara dugaan manipulasi data di KPU Minahasa Utara, meskipun sulit ditindaklanjuti karena ketua KPU meninggal. Sorotan juga diberikan pada Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, yang dinilai melanggar etik karena memiliki hubungan pribadi dengan "wanita emas" dan tidak menjalankan keputusan Mahkamah Agung terkait keterwakilan perempuan. Visual menunjukkan banyaknya caleg mantan narapidana korupsi yang tetap diloloskan, terutama dari partai pendukung paslon 02.

Di akhir *scene*, karikatur Anwar Usman menggendong Gibran dengan tulisan "tak gendong kemana-mana" muncul untuk menguatkan pesan simbolik bahwa seluruh penyimpangan sistemik diarahkan demi memuluskan langkah Gibran sebagai cawapres. Tiga sanksi etik yang dijatuhkan kepada Hasyim Asy'ari diperlihatkan yaitu pelanggaran terkait wanita emas, keterwakilan

perempuan, dan pencalonan anak presiden, semuanya berujung pada peringatan keras terakhir. Narasi Zainal mempertanyakan makna "peringatan keras terakhir" yang seolah tidak berarti karena terus berulang. Pertanyaan reflektif "ada apa dalam konstruksi kita membangun sistem penegakan hukum dalam wilayah pelaksanaan pemilu?" ditutup dengan visual foto berjejer yaitu Anwar Usman, Gibran, dan Jokowi, menyiratkan konstruksi kekuasaan yang dinasti dan tidak netral.